

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN KARANGASEM

Ni Kadek Kartini Dwi Cahya Ninggrum¹
I Ketut Suardhika Natha²

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
(Unud), Bali, Indonesia

e-mail: nikadekkartinidwicahya@gmail.com / telp: +62 81236 122 158

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sudah menjadi satu permasalahan sosial yang sudah menjadi permasalahan global di hampir semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan sendiri juga disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak jauh berbeda dengan pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karangasem. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data *time series* yang dimulai tahun 1999 hingga tahun 2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa PDRB dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Serta pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Kata Kunci: PDRB, pengangguran, pendidikan, kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is one of the social problems that have become a social problem that has become a global problem in almost all countries, including Indonesia. Poverty itself is also caused by a variety of factors that are not much different from the unemployed. The purpose of this study was to determine the factors that affect poverty in Karangasem regency. This research was conducted in Karangasem regency. Data collected through the documents contained in the BPS Bali. The data used in this research is secondary data is data time series that began in 1999 until 2014. The analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the analysis result that the GDP and education have negative and significant effect of on poverty. Unemployment as well as have a positive effect on poverty in Karangasem regency.

Keywords: GDP, unemployment, education, poverty

PENDAHULUAN

Setiap daerah mulai tingkat provinsi sampai kabupaten/ kota diharapkan mampu menggali potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mampu menangani setiap masalah yang timbul sebagai dampak

aktivitas pembangunan. Pengenalan terhadap potensi daerah, baik yang bisa digali sebagai kekuatan atau keunggulan maupun yang berpotensi sebagai kendala atau kelemahan merupakan masukan yang sangat berharga guna merancang strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat formula yang tepat agar dapat terurai. Indonesia sebagai Negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang begitu besar, yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang sulit untuk diakses. Kemiskinan dapat diartikan sebagai dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh.

Kemiskinan merupakan konsep multi dimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran misalnya pendapatan, kesehatan, dan keamanan. Disisi lain jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidak berdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000.

Salah satu generalisasi yang paling sah mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-

kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Para ahli ekonomi pembangunan mulai mengukur tingkat kemiskinan di dalam suatu negara dan kemiskinan relatif antar negara dengan cara menentukan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang lain juga menyangkut keterbelakangan manusia dalam pengembangan sumber daya alam.

Penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah.

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPS Provinsi Bali (2015), menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2014 mengalami fluktuasi dengan jumlah terbanyak berada dipedesaan. Penyebab kemiskinan berlandaskan pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) Arsyad (2003). Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013). Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu kondisi dimanasebuah Negara akan tetap miskin dan akan mengalamibanyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunanyang lebih tinggi. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara

eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah Negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Karangasem Tahun 1999-2014

Tahun	Presentase (%)
1999	6,72
2000	6,05
2001	6,21
2002	8,55
2003	7,82
2004	6,51
2005	7,67
2006	9,42
2007	8,95
2008	7,67
2009	6,37
2010	7,95
2011	6,43
2012	5,63
2013	6,88
2014	7,30

Sumber BPS BALI, 2015

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, pendidikan, inflasi, upah minimum, jumlah tenaga kerja. Namun faktor-faktor yang lebih sering terjadi terhadap kemiskinan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan pendidikan. Indeks harapan hidup digambarkan melalui data angka harapan hidup, sedangkan indeks pendapatan digambarkan melalui kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator-indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah yang penting bagi setiap negara di dunia terlepas dari struktur ekonomi negara tersebut (Alp Ozel et al, 2013). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua Negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di Negara manapun dapat segera jatuh dan bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003), Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Sedangkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan

Pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB berdasarkan dengan kemiskinan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu diperlukan terjadi disektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sector pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sector modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti,2008).

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi negatif maka kegiatan perekonomian mengalami penurunan, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi positif dapat dikatakan kegiatan perekonomian meningkat (Erawati,2010). Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa

merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Menurut Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007). Selama tahun 1999-2014 Kabupaten Karangasem mengalami perkembangan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Karangasem tahun 1999-2014

Tahun	Jumlah (Juta Rp)	Perkembangan (%)
1999	524.520,42	-
2000	537.461,93	4,30
2001	552.669,27	3,39
2002	569.077,58	3,91
2003	568.236,89	2,59
2004	1.366.090,41	2,47
2005	1.436.224,88	3,75
2006	1.505.163,65	3,34
2007	1.583.407,93	3,45
2008	1.663.749,20	3,20
2009	1.747.169,48	3,01
2010	1.836.131,65	2,91
2011	1.931.438,83	2,82
2012	2.002.149,18	2,63
2013	2.042.135,04	2,48
2014	2.482.884,77	2,53

Sumber: BPS BALI, 2015

Berdasarkan Tabel 2 perkembangan PDRB dasar nilai konstan dari tahun 1999-2014 meningkat drastis. Dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan PDRB atas nilai konstan yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 1.931.438,83 juta rupiah dengan presentase 2,82%. Sedangkan nilai konstan yang terendah pada tahun 1999 sebesar 524.520,42 juta rupiah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi memainkan peran dalam strategi dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan tanggung jawab pengeluaran ke tingkat pemerintahan (Sudewi, 2013). Kebijakan pertumbuhan perlu dilengkapi dengan intervensi khusus dalam mendukung orang miskin, sementara stabilitas makroekonomi dan politik dan pemerintahan yang baik dianggap sebagai prasyarat untuk pengentasan kemiskinan (Steiner, 2005).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya pengangguran. Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang sudah tergolong sebagai angkatan kerja dan ingin untuk bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan

(Wijayanti, 2014). Seorang angkatan kerja yang tidak aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur. Kekurangan pengeluaran agregat adalah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran (Mahayana, 2014). Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya (Prayuda, 2016). Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang hidup dalam garis ekonomi menengah kebawah, dan umumnya mereka berasal dari desa yang berbondong-bondong pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan penghasilan dan hidup yang layak dengan kemampuan mereka yang pas-pasan.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Karangasem Tahun 1999-2014

Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
1999	2,60
2000	2,72
2001	2,78
2002	2,80
2003	2,97
2004	2,34
2005	2,32
2006	2,82
2007	3,30
2008	3,20
2009	3,32
2010	2,82
2011	1,99
2012	1,34
2013	1,34
2014	1,30

Sumber: BPS BALI, 2015

Berdasarkan Tabel 3 tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Karangasem dari tahun ketahun menurun. Dimana dapat dilihat dari tahun 1999

sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 3,30%, sedangkan tingkat pengangguran terendah pada tahun 2014 yaitu 1,30%.

Meningkatnya kemiskinan suatu negara menjadi salah satu dampak terbesar dari tingginya tingkat pengangguran, semakin banyak pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di suatu negara. Hal itulah yang terjadi di Indonesia dewasa ini pengangguran yang semakin tinggi membuat pendapatan rendah bahkan mungkin tidak ada pendapatan. Hal itu juga membuat sebagian dari mereka yang pengangguran mengambil jalan pintas sebagai sarana menyambung hidup.

Maka dari itu pengangguran dan kemiskinan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat hingga saat ini terutama Indonesia. Karena dengan meningkatnya pengangguran secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan menyebabkan beberapa perilaku menyimpang seperti tingkat kriminalitas yang tinggi dan beberapa masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, harus mengupayakan agar usaha perluasan lapangan kerja dan pengentaskan kemiskinan ini dapat digalang menjadi tekad politik yang besar dan bulat sebagaimana kita pernah menggalang tekad serupa mencapai semberda pangan.

Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus – menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Hadi Hasana, 2009), jika hal ini tidak dengan cepat diatasi maka akan

menyebabkan masalah kesejahteraan dan kerawanan sosial yang nantinya berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Cang dan Wu, 2012). Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat hingga saat ini terutama Indonesia. Karena dengan meningkatnya pengangguran secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan menyebabkan beberapa perilaku menyimpang seperti tingkat kriminalitas yang tinggi dan beberapa masalah sosial lainnya.

Pengentaskan kemiskinan ini dapat digalang menjadi tekad politik yang besar dan bulat sebagaimana kita pernah menggalang tekad serupa mencapai semberda pangan. Pengangguran dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara misalnya menurut wilayah geografis, jenis pekerjaan dan alasan mengapa orang tersebut menganggur. Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang hidup dalam garis ekonomi menengah kebawah, dan umumnya mereka berasal dari desa yang berbondong-bondong pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan penghasilan dan hidup yang layak dengan kemampuan mereka yang pas-pasan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam dan lingkungannya. Pendidikan sangat penting bagi setiap anak bangsa, karena dengan ilmu yang didapatnya, seorang anak mampu mempertahankan hidupnya. Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa (Iswara, 2014). Namun, biaya yang

mahal justru sangat menghambat berkembangnya pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk rendah, atau dengan kata lain masih banyak orang miskin di negara Indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yang mereka terima rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem tahun 1999-2014

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
1999	6,70
2000	6,65
2001	6,95
2002	6,82
2003	6,42
2004	6,30
2005	9,86
2006	9,75
2007	9,86
2008	10,31
2009	11,25
2010	11,80
2011	12,60
2012	12,75
2013	12,85
2014	12,90

Sumber: BPS BALI, 2015

Berdasarkan Tabel 4 bisa dilihat dari tahun ketahun rata-rata lama sekolah naik turun. Bisa dilihat pada tahun 2001 lama sekolah menurun yaitu 6,95 tahun, sedangkan pada tahun 2006 lama sekolah meningkat secara tajam yaitu 9,75 tahun. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Sehingga

perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Pada tahun 1999-2004 banyak anak-anak yang tamat sampai tingkat SD (Sekolah Dasar), sedangkan dari tahun 2005-2014 banyak anak-anak yang tamat SD, SMP dan SMA. Karena pada tahun 2002 terjadinya bom Bali pertama. Karena banyak penduduk/ masyarakat di keluarkan karena terjadinya pengurangan karyawan. Maka dari itu orang tua mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Oleh karena itu, banyaknya penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar banyak mencari pekerjaan untuk membiayai hidup mereka.

Dampak kemiskinan terhadap pendidikan sangat besar. Jika kemiskinan tidak segera diatasi maka untuk mencapai pendidikan yang bermutu sangat sulit, karena di zaman yang modern seperti sekarang ini persaingan sangat ketat, segala sesuatu membutuhkan sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :
Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), pengangguran dan pendidikan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.
Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), pengangguran dan pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Pada umumnya, permasalahan mengenai pendidikan dan kemiskinan di negara berkembang hampir serupa. Umumnya, negara-negara ini menghadapi dilema; apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih dahulu dipacu atukah pendidikan yang lebih baik. Persoalan ini sukar dijawab, sehingga ia lebih merupakan sebuah lingkaran setan (*vicious circle*).

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian.

Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan. Jadi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan adalah negative dengan ini bila pendidikan meningkat maka kemiskinan menurun dan sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karangasem, karena Karangasem Kabupaten yang sangat terkenal dengan penduduk miskin .Data-data yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang terkait

dengan obyek-obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Produk Domestic Regional Bruto(PDRB), pengangguran, dan pendidikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Karangasem, baik secara simultan maupun parsial periode 1999-2014. Pengolahan data menggunakan program aplikasi *software* SPSS 13.0 For Windows. Menurut Gujarati (2006:91), persamaan linier berganda dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem
- X₁ = Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)
- X₂ = Pendidikan
- X₃ = Pengangguran
- μ = Variabel Pengganggu
- α = Faktor intersep yang menggambarkan pengaruh rata-rata semua variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
- β₁... β₃ = Koefisien regresi dari masing-masing X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan model regresi variabel terikat dan bebas diatas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= 8,3962103 - 0,0000015(X_1) + 0,1402620(X_2) - 0,1966188(X_3) \\
 Sb_j &= (0,73086) \quad (0,0000005) \quad (0,0648024) \quad (0,18884862) \\
 t_j &= (11,488) \quad (-0,3177) \quad (2,164) \quad (0,1043) \\
 Sig &= (0,000) \quad (0,008) \quad (0,051) \quad (0,317) \\
 R^2 &= 0,548 \\
 F &= 4,854, \text{ nilai } p\text{-value} = 0,019
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh hasil F_{hitung}= 4,858 dan F_{tabel}= 3,49. Oleh karena itu F_{hitung} > F_{tabel}, maka H₀ ditolak dan H_i diterima. Hal ini berarti PDRB, Pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Hasil ini didukung

oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,548 yang memiliki arti bahwa 54,8 persen variasi naik turunnya kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB, pengangguran, dan pendidikan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dijelaskan dalam model.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $-3.177 < -1,782$ maka, H_0 ditolak. Ini berarti PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya bila PDRB meningkat maka kemiskinan menurun, dan sebaliknya jika PDRB menurun maka kemiskinan meningkat.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara, dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan.

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.

PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan factor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan factor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan harga konstan dengan tujuan berbeda.

Pengaruh Pengangguran Terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $2,164 > t_{tabel} 1,782$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Ada hubungan erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnyakemiskinan. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan

tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part-time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sector pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas (Arsyad, 2004:289)

Teori lingkaran setan menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai tingkat produktivitas seorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini karena pengangguran tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji/upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pengangguran ini lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mereka harus hidup di bawah garis kemiskinan. Factor ini diekspetasikan akan menyebabkan hubungan yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain semakin banyak pengangguran akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan (Dicky, dkk., 2013). Jadi hubungan pengangguran dengan kemiskinan adalah positif artinya bila pengangguran naik maka kemiskinan juga naik dan sebaliknya.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Karangasem

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $-1,043 > -1,782$ maka H_0 diterima. Ini berarti pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian.

Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan. Jadi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan adalah negative dengan ini bila pendidikan meningkat maka kemiskinan menurun dan sebaliknya.

Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin

selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan. Jadi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan adalah negative dengan ini bila pendidikan meningkat maka kemiskinan menurun dan sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, pengangguran, dan pendidikan secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Hasil uji secara parsial maka didapatkan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem, serta pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Saran

Pemerintah perlu lebih memperhatikan terkait kemiskinan, PDRB, pengangguran, dan pendidikan di Indonesia. Sinerginya informasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pendidikan yang tercermin dari besarnya lulusan sekolah menengah atas, sehingga diharapkan pemerintah di Kabupaten Karangasem kembali menggalakan program pemberantasan putus sekolah supaya dapat menekan

kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif terhadap kemiskinan, maka yang diharapkan pemerintah lebih maksimalkan sector informal. Sehingga perlunya peningkatan sector informal untuk menekan kemiskinan karena sektor informal merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran.

REFERENSI

- Alp Ozel, Hasan et al. 2013. Investigation Of Economic Growth and Unemployment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis. *International Journal Of Business and Social Science*, Vol. 4 No.6, June 2013 : 163 – 164.
- Arsyad, Lincolin. 2003, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua, Yogyakarta, STIE-YKPN.
- _____. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN
- Ashcroft, Vincent dan David Cavanaugh. 2008. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), pp: 335-363.
- Astrini, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), pp: 384-392.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. *Badung Dalam Angka*. Denpasar: Biro Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Cang, Juin – Jen dan Wu, Chi – Hsin. 2012. Crime, Job Searches, And Economic Growth. *International Atlantic Economic Society*. PP: 1-20.
- Erawati, Komang. 2011. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*.
- Hadi Hasana. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16. No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Iswara, I Made Anom Dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *E-Jurnal EP Unud*, 3(11), h: 492-501.
- Kuznets, Simon. 1955. “Economic Growth and Income Inequality”. *The American Economic Review*, Volume XLV March, 1955 Number One.
- Mahayana, A., dan Wayan Sukadana. 2014. Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Pada Permintaan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 3 (8), h: 284-394.
- Mudrajad, Kuncoro. 1997. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Prayuda, M., dan Urmila Dewi. 2016. Pengaruh Inflasi Dan Investasi Yang Berpengaruh Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali tahun 1994-2013. *Jurnal EP Unud*, 5 (1), pp: 69-95.
- Purba, Yofa Selvida Theresia dan Luh Putu Aswitari. 2016. Pengaruh Peran Sektor Non-Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 5(7), h : 799-824.
- Putri, I. A. P. Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), pp: 441-448.
- Steiner, Susan. 2005. *Decentralisation And Poverty Reduction: A Conceptual Framework For The Economic Impact*. Working Papers. German Overseas Institute. GOI-WP-03/2005.
- Sudewi, Ni Nyoman Ayu dan I. G. A, Putu Wirathi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3).
- Sukirno, Sadono. 2004, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suputra, I Putu Eka dan Ni Putu Martini Dewi. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(2), h: 105 – 112.
- Tambunan, Tulus T.H., 2001, *Transformasi Ekonomi Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Jakarta : PT Salemba Emban Patria

Wijayanti, S., dan Ni Luh Putu Karmini.2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 3 (10), h: 460-466.

World Bank, 2004. *Era baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT Grha Info Kreasi.